



Implementasi Program Pembedayaan Nelayan Tradisional Di Pulau-Pulau Kecil Morotai Tahun 2023

Saiful Sumai

Dosen Universitas Pasifik Morotai

Received: 20 Juni 2025

Revised: 27 Juni 2025

Accepted: 01 Juli 2025

Abstract

The implementation of the traditional fishermen empowerment program on the small islands of Morotai is the implementation of the program of the Marine and Fisheries Service of Morotai Island Regency which is contained in the 2023-2026 marine and fisheries development strategy plan. The implementation of traditional fishermen empowerment programs is directed at improving the welfare of coastal communities and small islands, also intended to realize increased productivity and quality of capture and aquaculture resources, boost investment added value, create economic competitiveness and create job opportunities. The location of this study is in DKP Morotai Island, Koloray Island, Galo-Galo and Ngele-Ngle. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, documentation studies with informant determination through purposive sampling and snowball sampling. The theory used is the implementation model of Goerge C. Edward III.

The results showed that the implementation of the empowerment program for traditional fishing groups on the small islands of Morotai refers to theoretical variables, this empowerment program has not been maximized due to (1) lack of budget; seen in budget political policies that have not fully met the interests of the target group of empowerment; (2) inadequate carrying capacity of human resources; It can be seen that the development of business systems that are still traditional in nature affects the productivity of the utilization of aquatic resources in conservation area zones.

Keywords: Implementation Empowerment Fishermen

(*) Corresponding Author: tomaleevo@gmail.com

How to Cite: Sumai, S. (2025). Implementasi Program Pembedayaan Nelayan Tradisional Di Pulau-Pulau Kecil Morotai Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.D), 556-567. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12845>

PENDAHULUAN

Implementasi pemberdayaan masyarakat dan seluruh prosesnya merupakan elemen dari 4 (empat) fungsi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pemberdayaan (*empowering*), pembangunan (*development*), pengaturan (*regulation*) dan pelayanan (*public service*). Fungsi pemerintah pada prinsipnya menggambarkan kinerja pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, tentu saja fungsinya melahirkan kemandirian, dan program pembangunan yang dicanangkannya menghasilkan kemakmuran rakyat.

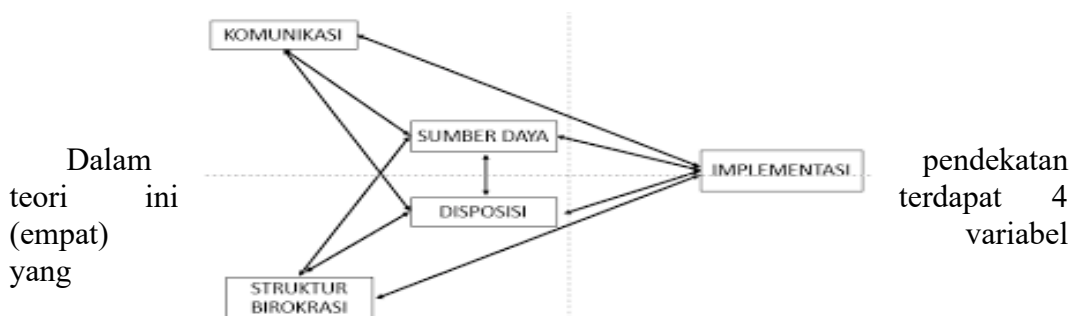
Di Indonesia, pola pemberdayaan yang memposisikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pemberdayaan tidak terlepas dari pergeseran sistem pemerintahan. Sejak diterapkannya sistem reformasi, iklim pemberdayaan masyarakat, tanpa terkecuali masyarakat pesisir yang mendiami pulau-pulau kecil mendapat ruang cukup besar untuk “diberdayakan”. Disamping itu, bahwa otonomi

daerah berdasarkan azasnya memberi implikasi positif kepada masyarakat untuk secara mandiri memanfaatkan dan/atau medaya-gunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi azas penyelenggaraan otonomi daerah.

Poin (b) Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program pemberdayaan semakin besar peluangnya seiring dengan program pengembangan wilayah dan/atau otonomi daerah yang memberi ruang memadai kepada pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam yang tersedia di daerah seperti sumber daya kelautan dan perikanan yang belum maksimal dikelola bahkan cenderung terabaikan. Atas dasar itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk dikelola dan dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan sumber daya perairan.

Dalam kerangka teoritis, implementasi program pemberdayaan merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan (Syaukani dkk, 2004:295). Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Leo Agustino, 2008:139). Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 1991:21).

Model implementasi yang digunakan dalam studi ini adalah model implementasi Goerge C. Edward III. Asumsi teori ini menggambarkan bahwa rangkaian implementasi kebijakan yang dapat diamati mulai dari program, proyek dan kegiatan. Implementasi kebijakan *top-down* yang dikembangkan George C. Edward III adalah model implementasi kebijakan *direct and indirect impact on implementation* dengan variabel sebagaimana dikemukakan (Budi Winarno, 2007:208) tampak pada gambar berikut.



mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel ini berhubungan antara satu dengan yang lain yaitu 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi, (Riant Nugroho, 2009:363).

1. Komunikasi pada prinsipnya merupakan variabel dasar yang memungkinkan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Terdapat tiga indikator dalam mengukur variabel keberhasilan komunikasi (a) transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula, (b) kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-burearats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) dan (c) konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. (Husaini Usman, 2006:3).
2. Sumber daya; variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber daya yang memungkinkan program-program kebijakan dapat dilakukan terdiri dari tiga elemen pokok yaitu staf, informasi dan wewenang.
3. Disposisi; variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C. Edward III adalah pengangkatan birokrat, (Leo Agustino, 2010:154).
4. Struktur birokrasi; keberhasilan implementasi kebijakan publik cenderung dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Bahwa ketersediaan sumber daya pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dengan kebijakan tersebut.

Implementasi program pemberdayaan masyarakat nelayan yang diusung Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terhadap kelompok-kelompok nelayan tradisional di pulau-pulau kecil; Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele merupakan satu kesatuan dengan program pembangunan nasional dalam *nawacita* presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla Periode 2014-2019 dengan konsep membangun Indonesia dari pinggiran. Implementasi program pemberdayaan nelayan tradisional di pulau-pulau kecil Morotai merupakan tindak lanjut program DKP Pulau Morotai dalam rencana strategi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2023-2026.

Implementasi program pemberdayaan nelayan tradisional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, juga dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya perikanan tangkap dan budidaya, mendorong nilai tambah investasi, menciptakan daya saing ekonomi dan menciptakan peluang kerja. Arah implementasi program pemberdayaan ini tentu saja sejalan dengan esensi pemberdayaan yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan aneka sumber dayanya dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan mempertimbangkan daya dukung dan keragaman sumber daya. Implementasi program pemberdayaan nelayan di Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele berbasis pemanfaatan potensi dan ketersediaan keragaman sumber daya kelautan dan perikanan di perairan zona 1 (satu) kawasan konservasi Taman Wisata Perairan

(WTP) dari Pulau Rao-Tanjung Dehegila. Konservasi dicadangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 361 Tahun 2018 dengan luasan 65.520,75 ha. Penyesuaian peta rupa bumi terbaru, luasan kawasan TWP Pulau Rao-Tanjung Dehegila menjadi 65.892,42 ha.

Pemetaan wilayah sistem zonasi, perairan kawasan konservasi adalah zona 1 (satu) dicanangkan sebagai Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP715). Perairan WPP715 sangat produktif untuk mengembangkan sistem usaha budidaya perikanan karena didukung letak geografis, kualitas air, pasang surut dan seterusnya yang sangat memungkinkan. Pengembangan sistem usaha perikanan tangkap tidak terkecuali, potensi perikanan tangkap perairan WPP715 dianggap sangat potensial dalam rangka menopang produksi sumber daya perikanan. Disamping itu, bahwa implementasi program pemberdayaan nelayan tradisional di pulau-pulau kecil Morotai didasarkan pada kesiapan dan/atau ketersediaan sumber daya manusia ("pengetahuan lokal" sistem penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan oleh masyarakat tempatan) menjadi modal dasar yang memungkinkan program pemberdayaan kelompok nelayan tradisional dilaksanakan.

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung tanpa terkecuali diikuti dengan rangkaian aktifitas/kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan evaluasi agar implementasi program pemberdayaan berlangsung dengan baik dan efektif. Dinamika implementasi program pemberdayaan kelompok nelayan di Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele merupakan komitmen dan wujud perhatian negara dan/atau pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di-satu sisi. Disisi lain, pola kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan sumber daya perairan pesisir kawasan konservasi yang dilakukan DKP Pulau Morotai Tahun 2023 belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat nelayan tradisional di pulau-pulau kecil. Untuk itu penelitian ini dilakukan dalam rangka mengemukakan berbagai variabel implementasi dalam program pemberdayaan.

METODE

Penelitian tentang Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Tradisional di Pulau-Pulau Kecil Morotai Tahun 2023 menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan/atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan jalan menggambarkan dan melukiskan keadaan yang ada sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, (Lexy J. Moleong, 2004:36). Penggunaan metode deskriptif dimaksud untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit masaalah yang diteliti, (Faisal Sanapiah, 1999:20).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemberdayaan

Implementasi program pemberdayaan nelayan tradisional di pulau-pulau kecil Morotai adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai yang memungkinkan

kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat berkembang dengan baik. Dalam tataran teori, implementasi merupakan suatu proses yang berlangsung dinamis dan mengarah pada pencapaian tujuan dan/atau sasaran program. Menerjemahkan konsep implementasi dalam pandangan Purwanto dan Sulistyastuti (1991) dapat dipahami bahwa implementasi program pemberdayaan nelayan tradisional di pulau-pulau kecil; Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele adalah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok sasaran (*target group*) yakni kelompok nelayan tradisional sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Implementasi program pemberdayaan terhadap kelompok nelayan tradisional ini merujuk pada teori implementasi yang dikembangkan George C. Edwar III. Dalam pendekatan teori ini, bahwa implementasi program kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika didukung dengan 4 (empat) variabel yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan tentu saja menentukan kadar dari sebuah program dan/atau kegiatan. Dinamika proses pemberdayaan kelompok nelayan tradisional di pulau-pulau kecil Morotai (Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele) dapat dilihat dalam variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Variabel Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Pola komunikasi antara pelaksana program/kebijakan di masing-masing bidang dalam struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Pulau Morotai dengan kelompok sasaran pemberdayaan di Koloray, Galo-Galo maupun Ngele-Ngele berlangsung baik. Penghubung komunikasi antara masing-masing kelompok nelayan dengan unit pelaksana program pemberdayaan nelayan ini melalui penyuluh-penyuluh yang dibentuk DKP Pulau Morotai maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak duabelas (12) orang yang ditempatkan di masing-masing kecamatan.

Disamping itu, bahwa pola komunikasi yang baik antara implementor/badan pelaksana dengan kelompok sasaran karena beberapa implementor memiliki hubungan keluarga dan kerabat dengan individu tertentu dalam kelompok yang juga berasal dari desa dan/atau pulau yang sama. Untuk kepentingan perkembangan program pemberdayaan nelayan di Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele, DKP Pulau Morotai secara intens membangun komunikasi dengan pihak swasta yang berkepentingan investasi di bidang kelautan dan perikanan, tanpa terkecuali perikanan budidaya.

Komunikasi horizontal antara bidang berlangsung baik sebab masing-masing kepala bidang 2 (dua) diantaranya bidang pengawasan dan penangkapan dan bidang penguatan daya saing produk merupakan anggota masyarakat dari pulau-pulau program pemberdayaan dilaksanakan berkepentingan atas pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Komunikasi struktur internal dengan pejabat pemerintah daerah berkaitan program-program pembangunan bidang kelautan dan perikanan didalamnya termasuk program pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir bidang usaha budidaya perikanan air tawar dan perikanan laut sangat sering dilakukan.

Variabel Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen

pokok antara lain ketersediaan staf; sistem informasi; distribusi kewenangan dan; daya dukung fasilitas.

a. Ketersediaan Staf

Staf termasuk penyuluh adalah sumber daya utama dalam implementasi program kebijakan. Staf dan terlebih lagi penyuluh merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program pemberdayaan di Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele tahun 2023. Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang ASN dan dibantu 6 orang penyuluh non-ASN yang ditugaskan kementerian KKP. Beberapa staf memiliki besik pengetahuan bidang kelautan dan perikanan yang cukup baik, sesuai latar belakang pendidikan sarjana ilmu kelautan. Selain staf, tenaga penyuluh yang ditugaskan kementerian KKP punya skill pengetahuan yang rata-rata baik dan tentu saja keberadaannya DKP Pulau Morotai merasa terbantu. Penyuluh ini merupakan orang-orang yang punya komitmen pendampingan yang bisa diandalkan.

b. Sistem Informasi

Informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelompok-kelompok nelayan anggota masyarakat pulau Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele, DKP pulau Morotai secara kelembagaan mengetahui dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan proses pemberdayaan sebagaimana tugas dan fungsi yang diembannya. *Kedua*, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah, ditingkat badan pelaksana (DKP Pulau Morotai) belum terlaksana sepenuhnya disebabkan faktor pendanaan operasional kegiatan pendampingan, penyuluhan sebagai media penting dalam menyampaikan informasi terkait program bidang kepada masyarakat di desa-desa pesisir.

c. Distribusi Kewenangan

Sebagai institusi pemerintah daerah, pelimpahan kewenangan secara struktural internal dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelompok nelayan di 3 (tiga) pulau tersebut dilakukan secara formal melalui surat tugas. Distribusi kewenangan di DKP Pulau Morotai dalam dimensi atasan bawahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit pelaksana.

d. Daya Dukung Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penunjang yang ikut menentukan kegagalan dan keberhasilan program kegiatan. Sarana penunjang pelaksanaan program yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai masih sangat minim dan karena faktor itulah, tidak bisa dipungkiri bahwa sejumlah program kegiatan tidak berjalan maksimal. Fasilitas pendukung pelaksanaan program yang masih minim dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan satu diantaranya adalah fasilitas fungsional penunjang kegiatan.

Variabel Disposisi

Variabel disposisi (pengangkatan birokrat) mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksana program di level struktural organisasi memiliki kualifikasi yang dianggap cukup baik, dan sebagian lainnya dapat dianggap belum cukup baik. Untuk meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia, terutama orang-orang yang sedang mengisi jabatan-jabatan struktural di lingkup DKP Pulau Morotai. Pemerintah Daerah mengusung program studi lanjut pascasarjana bagi aparatur sipil negara di setiap dinas dan badan. Untuk kepentingan disposisi dengan

indikator kualifikasi pendidikan maka kepala dinas kelautan dan perikanan pulau Morotai merekomendasikan 3 (tiga) pejabat DKP pulau Morotai esalon IIIa dan IIIb untuk mengikuti program pendidikan tersebut.

Variabel Struktur Birokrasi

Implementasi program pemberdayaan kelompok nelayan di Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele belum mendapat dukungan secara maksimal dari pemerintah dalam hal ini pejabat kepala daerah. Hal ini tampak jelas dalam kebijakan politik anggaran yang direalisasikan dalam program ini. Karena itulah beberapa program pemberdayaan terlaksana tidak maksimal disebabkan masih minimnya keberpihakan pemerintah daerah dalam plotting anggaran untuk program pemberdayaan nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kementrian Kelautan dan Perikanan juga belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan pemberdayaan nelayan tradisional di pulau-pulau tersebut meskipun di-satu sisi program pembangunan kelautan dan perikanan terus didorong melalui berbagai kebijakan strategis, sala satunya menetapkan Pulau Morotai sebagai sentral kelautan dan perikanan terpadu yang berorientasi pada industri perikanan nasional, namun justeru dapat dianggap mengabaikan kepentingan nelayan kecil di pulau-pulau kecil.

Dasar Hukum Implementasi Program Pemberdayaan

Landasan hukum implemetasi program pemberdayaan nelayan tradisional di pulau-pulau kecil Morotai (Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk dikelola dan dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan sumber daya perairan. UU ini memberi ruang yang memadai kepada Pemerintah Daerah Pulau Morotai dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Pulau Morotai. disamping itu, pada tataran pendanaan dan teknis penyaluran sarana dan prasarana pendukung program pemberdayaan mengacu pada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam implementasi program pemberdayaan kelompok nelayan di pulau-pulau kecil Morotai merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 yang pada lampirannya memuat secara runut tata cara penyaluran pbantuan nelayan yang bersumber dari DAK dalam rangka peningkatan produktivitas nelayan dalam semua senis usaha bidang kelautan dan perikanan.

Sumber Anggaran Program Pemberdayaan

Dalam rangka meningkatkan volume produksi perikanan tangkap dan budidaya serta produksi pasca tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan mengalokasikan anggaran program pemberdayaan nelayan tradisional di-3 (tiga) desa pulau yakni Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele pada 2023 sebesar Rp.1.108.000.000 (satu milyar seratus delapan juta rupiah). Berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana Dana Alokasi Khus Fisik Tahun Anggaran 2023, sistem penyaluran dana ini sesuai usulan kelompok nelayan dengan demikian dana ini tidak disalurkan tunai kepada masing-masing kelompok nelayan melainkan dalam bentuk barang yang sumber pendanaannya diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2023 dari total pendapatan sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Adapun realisasi anggaran dan kegiatan pemberdayaan nelayan tradisional di

Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele pada tabel capaian realisasi anggaran dan kegiatan pemberdayaan nelayan di Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele.

Sasaran Program Pemberdayaan

Sasaran program pemberdayaan ini adalah masing-masing kelompok-kelompok nelayan yang berada di pulau-pulau tersebut. Secara teknis, syarat utama bagi setiap kelompok sasaran program pemberdayaan yakni *pertama*; telah terbentuknya kelompok nelayan perikanan tangkap maupun budidaya minimal 5 (lima) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang dalam 1 (satu) kelompok *kedua*: terpenuhinya syarat administratif pembentukan kelompok antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP), keterangan domisili, rekomendasi dari desa dan proposal. Syarat-syarat ini di ajukan ke DKP Pulau Morotai untuk dijadikan sebagai dasar menentukan kelompok sasaran dalam program pemberdayaannya.

Implementasi program pemberdayaan dilakukan melalui stimulus sarana dan prasarana pendukung sistem usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun maupun produksi hasil tangkapan melalui; (1) program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pasca tangkap melalui bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro; (2) program peningkatan perikanan rakyat melalui penyediaan Keramba Jaring Apung (KJA). Sarana KJA terdiri dari 2 (dua) jenis budidaya yakni *akuacultur* dan *policultur* dan prasarana pendukung operasional; (3) program peningkatan produksi rumput laut melalui penyediaan sarana pendukung pengembangan sistem budidaya rumput laut dan; (4) program peningkatan produksi perikanan tangkap melalui penyediaan sarana Fiber Glass dan *GPS Fish Finder FF Plus*. Implementasi program pemberdayaan di pulau-pulau kecil Morotai dari aspek peruntukannya dianggap tepat sasaran sementara pada aspek pelaksanaannya dianggap belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Sebab program ini belum mampu menyentuh kebutuhan dasar terdesak” yang diharapkan seperti pengembangan akses permodalan, akses pemasaran, pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan, dan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir.

Capaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan di Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele

No	Program/ Kegiatan	Nama Pekerjaan	Vol	S a t u a n	Lokasi	S u m b e r D a n a	PAG U ANG GAR AN	REA LISA SI	
							Nilai Pagu	F i s i k	Ke ua ng an
							(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	PROGRA	Pengadaan	1	P	Morotai	D	40.00	1	10

1	M PENGEL OLAAN PERIKA NAN TANGKA P	Mesin Tempel 15 PK		a k et	Selatan Barat, Pulau Ngele Ngele	A K	0.000		0
		Pengadaan GPS Fish Finder	3	P a k et	Morotai Selatan Barat, Pulau Ngele Ngele	D A K	36.00 0.000	3	10 0
			3	P a k et	Morotai Selatan, Pulau Koloray	D A K	36.00 0.000	3	10 0
			3	P a k et	Morotai Selatan, Pulau Galo Galo	D A K	36.00 0.000	3	10 0
		Pengadaan Armada Tangkap Nelayan Kecil	1	P a k et	Morotai Selatan Barat, Pulau Ngele Ngele	D A K	130.0 00.00 0	1	10 0
			1	P a k et	Morotai Selatan, Pulau Koloray	D A K	130.0 00.00 0	1	10 0
2	PROGRA M PENGEL OLAAN PERIKA NAN BUDIDA YA	Persediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur di Kecamatan Morotai Selatan Barat	1	P a k et	8207.03 0 Morotai Selatan Barat, Pulau Ngele Ngele	D A K	150.0 00.00 0	1	10 0
		Persediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Laut di Kecamatan Morotai	1	P a k et	8207.01 0 Morotai Selatan, Pulau Koloray	D A K	200.0 00.00 0	1	10 0

		Selatan						
		Persediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Morotai Selatan	1	P a k e t	8207.010 Morotai Selatan, Pulau Galo Galo	D A K	100.000.000	1 100
		Persediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Morotai Selatan Barat	1	P a k e t	8207.030 Morotai Selatan Barat, Pulau Ngele Ngele	D A K	100.000.000	1 100
3	PROGRA M PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Bedah Unit Pengolah Ikan (UPI) Skala Mikro Kecil di Kecamatan Morotai Selatan	1	U n i t	8207.010 Morotai Selatan, Pulau Koloray	D A K	150.000.000	1 100

Sumber : Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, Tahun 2023

KESIMPULAN

Dinamika roses pemberdayaan kelompok nelayan tradisional di pulau-pulau kecil Morotai (Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele) dengan pendekatan teori implementasi dapat dilihat dalam variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di Tingkat pelaksana program ini berlangsung relatif baik sebab semua variabel menunjukkan hal-hal positif. Jika pun terdapat; program ini belum berjalan maksimal, akibat dari pembiayaan program ini belum memadai. Implementasi program pemberdayaan nelayan di Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele merupakan langkah tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat tentang percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Program ini dimaksud sebagai penopang utama peningkatan kesejahteraan rakyat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui strategi stimulus armada tangkap, sarana dan prasarana budi daya perikanan rakyat sistem Keramba Jaring Apung (KJA), sarana budidaya rumput laut dan Unit Pengolahan Ikan (UPI), sebagai unit sarana produksi ikan asing. Sarana-sarana tersebut

diberikan kepada masyarakat agar supaya tingkat produksi perikanan tangkap maupun perikanan budi daya yang dikembangkan bisa meningkat.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa implementasi program pemberdayaan terhadap aspek sumberdaya perikanan, sosial-budaya, teknologi dan ekonomi masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil Morotai diperoleh potensi, kekuatan dan kelemahan. Potensi dan kekuatan harus tetap dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang menjadi faktor penghambat program pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil Morotai. Adapun hambatan-hambatan utama dalam proses program pemberdayaan ini yakni tidak terbukanya peluang akses permodalan yang memadai bagi nelayan tradisional di pulau-pulau kecil Morotai; teknologi dan skala usaha perikanan yang masih minim; akses pemasaran hasil perikanan yang masih jauh dari sebagaimana diharapkan nelayan dan; instrument penguatan kelembagaan masyarakat pesisir yang belum berfungsi dengan baik.

SARAN/REKOMENDASI

Untuk memperbaiki kelemahan program pemberdayaan dimasa mendatang, urutan strategi prioritas pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pengembangan Akses Permodalan

Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya permasalahan utama masyarakat nelayan di Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele khususnya nelayan pembudidaya ikan dan rumput laut sangat sulit memperoleh modal untuk pengembangan teknologi dan skala usahanya;

2. Pengembangan Teknologi dan Skala Usaha Perikanan

Alat penunjang penangkapan yang digunakan nelayan di Koloray, Galo-Galo dan Ngele-Ngele pada umumnya masih sederhana. Karena itu produktivitas hasil tangkapan belum signifikan dan berefek pada pendapatan. Upaya peningkatan pendapatan nelayan harus diiringi dengan perbaikan teknologi secara terintegrasi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi;

3. Pengembangan Akses Pemasaran

Prioritas ketiga strategi pemberdayaan masyarakat pesisir adalah pengembangan akses pemasaran. Pasar adalah faktor penting dalam menjalankan usaha. Pasar bisa menjadi kendala utama pengembangan usaha bila tidak berkembang. Karena itu, membuka akses pemasaran adalah cara untuk mengembangkan usaha perikanan;

4. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pesisir

Pola penguatan kelembagaan masyarakat pesisir harus dibagi kedalam tiga (3) aspek yaitu periode inisiasi; periode institusionalisasi dan; periode diversifikasi. Periode inisiasi merupakan periode membangun, memotivasi, dan memfasilitasi masyarakat pesisir agar mampu memanfaatkan sumber daya secara maksimal; periode institusional merupakan periode pengembangan dan penguatan organisasi-organisasi masyarakat dan; periode diversifikasi merupakan periode perluasan unit-unit usaha disesuaikan dengan dibidang usaha masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiono, Leo, (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
Buku Pedoman Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2026

- Lexy, J. Moleong, (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant, (2009). *Public Policy*. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto dan Sulistyastuti, (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sanapiah, Faisal, (1999). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Gramedia
- Syaukani, dkk, (2004). *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta : Yogya Pustaka
- Usman, Husaini, (2006). *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi, (2007). *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Jakarta : PT Buku Kita
- Salinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Salinan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
- <https://www.Researchgate.Net/Figure>, akses, 17 Januari 2024
- www.mongabay.co.id 26 April 2019, akses, 17 Januari 2024